



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TB. HAERU RAHAYU**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **102398**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.908.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 556 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.415.000.000
6. Tanah Seluas 2.685 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 201.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI KENDARAAN RODA EMPAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 368.165.612**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	252.808.729
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.021.006.310
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.750.980.651
III. HUTANG	Rp.	1.046.924.219
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.704.056.432

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.